

BAB V

KESIMPULAN

Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, para pembuat keputusan menjadikan kepentingan nasional negaranya sebagai faktor penentu dan sebagai panduan bagi pembuatan dan menjalankan politik luar negerinya. Kebijakan politik luar negeri, dibuat untuk mencapai kepentingan nasional negara yang merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu negara.

Bagi para penguasa China (RRC), stabilitas domestik dan integritas teritorial yang merupakan kepentingan nasional negara, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menyusun strategi untuk menjadikan China sebagai negara adidaya yang berpengaruh dalam berbagai lingkup kehidupan global, ekonomi, dan politik. Karena itu, sangat penting untuk menjamin tegaknya sebuah negara yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional.

Dalam masalah yang terjadi antara China dan Tibet, yaitu merupakan masalah yang menyangkut tentang integritas teritori dan kedaulatan China atas Tibet, Pemerintahan China yang dikuasai oleh partai komunis mengklaim bahwa wilayah Tibet merupakan wilayah kedaulatannya yang terintergrasi dan merupakan kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.

Sebenarnya konflik yang terjadi antara China dan Tibet, telah terjadi selama berabad-abad dan nyaris terlupakan dan kehilangan dari sorotan dunia internasional. Namun, konflik ini mulai memanas kembali ketika tentara China

berhasil menggeser dalai lama dari kekuasaannya dan berhasil menguasai Ibukota Lhasa pada tahun 1951 dan mengancam kemerdekaan Tibet. Sikap pemerintah China terhadap Tibet ini, karena pemerintah China mengklaim Tibet sebagai wilayah teritorinya berdasarkan faktor historis dan fakta-fakta yang ada, yang menunjukkan bahwa wilayah Tibet merupakan wilayah kedaulatan China. Namun rakyat Tibet tidak menyetujui pengklaiman pemerintah China atas Tibet.

Karena sistem pemerintahan China di bawah kekuasaan komunis yang menerapkan pemerintahan terpusat, maka pemerintah China mewajibkan rakyat Tibet, untuk mentaati dan menjalankan sistem pemerintahan yang berlangsung di China, sedangkan rakyat Tibet dalam pemerintahannya sangat bertolak belakang dari pemerintahan komunis China. karena hal tersebut, rakyat Tibet menyatakan keinginannya untuk mendapatkan otonomi khusus dan ingin memisahkan diri dari China dan membentuk negara yang independen yang lepas dari China.

Sikap pemerintah China yang mengusir Dalai Lama dari pemerintahannya, dikarenakan oleh penolakan Dalai Lama dan rakyat Tibet terhadap ideologi komunis yang dibawa oleh Mao Zedong dan lebih memilih ideologi pemerintahan sebelumnya yang berbentuk nasionalisme di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek. Tibet mengatakan bahwa kebijakan yang dibawa oleh Mao, telah melanggar Hak Asasi Manusia dan mengklaim bahwa hal tersebut, mengakibatkan tercapainya sebuah negara polisi yang menimbulkan rasa takut.

Untuk tetap mempertahankan Tibet dan meredam konflik yang terjadi antara keduanya, pemerintah China berusaha untuk merebut hati rakyat Tibet. Untuk itu, pemerintah China melakukan upaya-upaya dan memberikan kebijakan

atas Tibet. Diantaranya, pemberian Otonomi Khusus pada Tibet, integritas bangsa Han dan meningkatkan taraf kehidupan di Tibet dan lain-lain.

Namun, meskipun pemerintah China telah memberikan Otonomi Khusus pada Tibet, Dalai Lama tetap menganggap bahwa kebijakan China adalah kebijakan yang hanya menguntungkan China saja dan pembangunan juga peningkatan taraf hidup di Tibet, hanya sebagai kamufase China untuk mencapai kepentingannya atas Tibet.

Konflik antara kedua belah pihak yang dimulai dengan adanya klaim China atas Tibet sebagai wilayah teritorinya dan keinginan Tibet untuk memisahkan diri dari China, sebagai bentuk penolakan Tibet terhadap klaim China, memuncak pada saat momentum penyelenggaraan pesta olahraga dunia atau *Olimpiade Beijing 2008*. Gerakan separatis Tibet yang dilakukan pada olimpiade Beijing tahun 2008 ini, dianggap China sebagai tindakan Tibet, untuk menarik perhatian dunia internasional dalam mendukung keinginan Tibet, menjadi negara yang independen dan lepas dari China.

Pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Tibet ini, berhasil mendapat respon dunia internasional. Masing-masing mendapatkan tanggapan dan dukungan kepada China dan Tibet. Negara-negara pro China, mendukung China untuk menyelesaikan masalah Tibet sesuai dengan undang-undang dan ketentuan serta kebijakan pemerintah China, untuk menjaga kedaulatan negaranya. Sedangkan dukungan bagi Tibet juga datang dari berbagai negarakhhususnya Amerika Serikat.

Bagi para penguasa China, melindungi kedaulatan dan integritas territorial negaranya adalah inti dari kepentingan negara, bangsa dan menjadi kewajiban

seluruh rakyat China, termasuk Tibet. China sebagai negara yang berdaulat, tidak akan menoleransi masalah pemisahan wilayah dan setiap negara berdaulat, memiliki hak untuk menggunakan segala upaya yang diperlukan, untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorinya. Meskipun harus dibayar mahal dengan luntarnya budaya asli Tibet yang identik dengan feodalisme Dalai Lama, integritas teritori China atas Tibet telah membawa perubahan yang positif di Tibet, pada sektor ekonomi, kehidupan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Selain itu, kepentingan nasional China terhadap Tibet yaitu mengenai keamanan wilayah. Hal ini sangat berkaitan dengan letak geografis Tibet, yang berbatasan dengan negara-negara di Selatan dan India, yang merupakan negara saingan China. Sehingga Tibet menjadi zona penahan untuk menghadapi negara tetangga tersebut dan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi pada negara tetangga tersebut. Karena Tibet berbatasan langsung dengan negara India, yang diklaim sebagai negara kontroversi bagi China, sehingga pemerintah China melihat bahwa Tibet merupakan wilayah yang strategis sebagai *buffer zone* bagi China dengan India.

Kepentingan nasional China berikutnya, yaitu mengenai masalah ekonomi China. Bagi China, penguasaan atas Tibet merupakan aset yang sangat berharga, melihat prediksi beberapa pakar bahwa China adalah salah satu negara yang bisa menggantikan posisi Amerika Serikat melalui ekonominya. Para ahli China memperkirakan bahwa di Tibet terdapat kandungan mineral yang berlimpah dan sangat penting bagi perekonomian China.

Tindakan China yang bersikeras mempertahankan Tibet, tidak luput dari peranan para penguasa negara yaitu, Partai Komunis China dan Birokrasi/Dewan Negara China, yang melihat bahwa Tibet merupakan wilayah teritori yang menjadi kepentingan nasional yang harus dipertahankan. Dengan kekuatan yang dimilikinya dalam pemerintahan, menjadikan para penguasa pemerintahan ini, mempunyai peran penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri China. Sehingga untuk mencapai kepentingannya atas Tibet, mereka menggunakan kekuasaannya salah satunya terlihat dengan tindakan pemerintah China yang terus mempertahankan Tibet sebagai wilayah teritorinya dan menekan juga membatasi intervensi dunia internasional terhadap masalah ini.

Pemerintah China memandang bahwa tindakan separatisme dan intervensi negara lain dalam masalah yang terjadi antara China dan Tibet, merupakan suatu ancaman bagi tercapainya kepentingan nasional China atas Tibet dan keutuhan wilayah China. Sesuai dengan salah satu prinsip politik luar negeri China yaitu tidak saling ikut campur terhadap urusan internal masing-masing negara (*non intervensi*). Oleh sebab itu pemerintah China tidak menyetujui adanya intervensi negara lain terhadap masalah China dan Tibet.

Dengan peran strategis China dalam Dunia Internasional dalam berbagai bidang, diantaranya pada bidang ekonomi, kekuatan militer, kerjasama-kerjasama, bantuan yang diberikan pada negara lain dan kepemilikan hak vetonya sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kepemilikan hak veto tersebut memberikan hak istimewa bagi China untuk membatalkan semua resolusi yang berpotensi merugikan atau mengganggu kepentingan nasionalnya dan

memperjuangkan kepentingannya. Selain itu, China mulai memiliki pengaruh yang besar terhadap negara lain. Dengan peran yang dimilikinya ini, negara lain tidak ingin mengambil resiko yang berdampak pada negaranya dan kerjasama yang telah dijalani dengan China. Sehingga dunia internasional akan menahan dan membatasi sikap intervensinya terhadap masalah yang terjadi antara China dan Tibet.